

DENGAN BAHAN BAKU MOCAF Mie Lebih Kenyal



KR-Muchtar M

Ibu-ibu nasabah PNM mengikuti pelatihan pembuatan makanan dari tepung mocaflour.

BANJARNEGARA (KR) - Tepung mocaflour dari singkong ternyata dapat dibuat mie instan yang memiliki keunggulan dibanding mie berbahan baku tepung gandum. Mie dari tepung singkong lebih kenyal.

Hal ini dibuktikan oleh ibu-ibu pedagang binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Banjarnegara pada pelatihan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Klusterisasi Unggulan Mocaflour PNM Banjarnegara, Senin-Selasa (21-22/11) di aula Kantor Desa Gumihwang Kecamatan Purwanegara.

Pembukaan pelatihan dihadiri Kepala Disperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono, Singgih Wicak-sena mewakili Kepala Dinas Pertanian, Rifai Azim mewakili Kepala Baperlitbang, dan Kepala Desa Gumihwang Arif Fahrudin.

Salah satu nasabah PNM, Sudaryani, tampil sebagai narasumber. Ia memberikan teori dan praktik langsung membuat olahan tepung mocaflour menjadi mie instan.

Kepala Cabang PT PNM Banjarnegara, Yosua Mawantyo Nugroho mengatakan, PNM mendukung upaya pengembangan potensi tepung mocaflour dari singkong, bahkan PNM membentuk Klusterisasi Sektoral Tepung Mocaflour.

"Pelatihan ini sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab kepada nasabah, dengan memberikan modal dan pendampingan usaha. Tepung mocaflour terbukti dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Mocaflour dari Banjarnegara juga sudah diekspor ke 5 negara," jelas Yosua.

Ia berharap, para peserta pelatihan bisa mengembangkan usaha dan memiliki pengetahuan baru mengenai apa saja turunan dari tepung mocaflour serta dapat menjadi sumber ekonomi serta dapat meningkatkan nilai jual produk. (Mad)-f

AKSES WARGA SUKOHARJO TERGANGGU BBWSBS Diminta Perbaiki Jembatan Ambles

SUKOHARJO (KR) - Akses warga terganggu setelah jembatan di Dukuh Terok RT 1 RW 7 Desa Karangasem Kecamatan Bulu ambles. Pemkab Sukoharjo minta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) selaku pemilik kewenangan untuk melakukan perbaikan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang menerima laporan jembatan ambles itu langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (23/11). Sejumlah pejabat ikut dalam rombongan sidak, salah satunya Kepala DPUPR Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo.

Bupati Sukoharjo melihat langsung kondisi jembatan dan kerusakan lainnya. Selain itu juga bertemu warga untuk meminta keterangan terkait dampak yang ditimbulkan. "Jembatan ambles Sabtu (19/11) lalu usai turun hu-

jan deras dan banjir. Padahal jembatan tersebut sangat dibutuhkan warga," jelas Etik Suryani.

Dalam pengecekan di lokasi, diketahui sungai dan jembatan tersebut menjadi kewenangan BBWSBS. Karena Pemkab Sukoharjo minta BBWSBS memperbaiki jembatan yang ambles. "Saya sudah minta DPUPR Sukoharjo segera melaporkan kejadian ini agar segera ditindaklanjuti, aebab jembatan tersebut menjadi kewenangan BBWSBS," tandas bupati.

Kepala DPUPR Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan jembatan ambles di Dukuh Terok Desa Karangasem Kecamatan Bulu, karena menjadi kewenangan sepenuhnya BBWSBS. Diharapkan kerusakan tersebut diperbaiki secepatnya. "Kami hanya bisa membantu memberi solusi sementara, dibuatkan sesek bambu untuk mempermudah akses war-

ga," ungkapny.

Hujan deras, Sabtu (19/11) lalu, juga mengakibatkan kerusakan pondasi tembok pagar dan rumah warga setempat, Yasun Sritanto. Pondasi tembok ambrol sekitar 30 meter.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Sri Maryanto

minta masyarakat mewaspadaai terjadinya bencana alam. "Cuaca sangat ekstrem, sering terjadi hujan deras dan angin kencang yang berdampak pada kerawanan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang. Cuaca ekstrem juga berdampak pada kerusakan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. (Mam)-f



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Bupati Etik Suryani saat sidak jembatan ambles di Dukuh Terok Desa Karangasem Kecamatan Bulu.

LINDUNGI WARISAN BUDAYA Sukoharjo Selamatkan Arsip Sejarah

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo gencarkan upaya penyelamatan arsip bernilai sejarah. Hal tersebut sebagai upaya melindungi warisan budaya. Sosialisasi mengenai program tersebut digelar di auditorium utama gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Rabu (23/11), dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani

Sosialisasi diikuti seluruh kepala dinas, camat, kepala desa dan tokoh masyarakat. Selain itu juga melibatkan penulis, peneliti, budayawan dan pemerhati sejarah. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sukoharjo, Sumarno mengatakan, pelestarian warisan budaya bangsa merupakan upaya tetap menjaga keutuhan sejarah peradaban bangsa

sebagai simbol perekat pemersatu bangsa.

"Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling mendukung upaya-upaya penyelamatan peninggalan warisan budaya dalam memperkokoh persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Sumarno.

Menurut Etik Suryani, peristiwa masa lalu yang dapat digunakan sebagai acuan pelajaran untuk masa yang akan datang.

"Arsip merekam informasi kegiatan atau peristiwa yang melekat pada wujud aslinya yang otentik, sah dan kredibel. Setelah masa kegunaan selesai, akan menjadi sejarah yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dalam ilmu pengetahuan ba-

gi generasi mendatang dalam melanjutkan cita-cita generasi terdahulu," ungkap bupati.

Dikatakan, arsip merupakan potret jatidiri bangsa yang harus mendapat perhatian agar dikelola dengan baik. Istilah masa lalu adalah investasi untuk masa depan, bukan hanya jargon semata. "Apa yang kita miliki dan rasakan sekarang merupakan hasil rintisan dari para pendahulu kita. Mempelajari masa lalu, berarti kita mempelajari sejarah, yang bisa dipelajari karena ada warisan sejarah," tandas Etik Suryani.

Disebutkan pula, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia melekat terhadap peranan warisan sejarah, yang sejatinya merupakan kekeayaan bangsa. Dalam hal ini waris-

an sejarah yang dimaksud adalah arsip dan benda-benda peninggalan sejarah.

Institusi lembaga kearsipan juga memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam menyediakan informasi mengenai keindahan sejarah perjalanan bangsa dan masyarakat lewat arsip, baik berupa tulisan, foto, dan audio visual.

"Kesadaran nasional berakar pada kesadaran sejarah, sedangkan kesadaran sejarah akan terbangun dengan baik dari kesadaran mendokumentasi arsip. Kesadaran sejarah juga dapat memantapkan identitas nasional sebagai simbol solidaritas nasional, yang mengarah pada upaya mempersatukan bangsa," ungkap Etik Suryani. (Mam)-f

HUKUM

BERAKSI DI WARTEG TETANGGA Pengedar dan Pembuat Upal Ditangkap

SEMARANG (KR) - Peredaran uang palsu terbongkar gara-gara aksi nekat Dim (24) dengan menukarkan uang palsu kepada tetangga sendiri pemilik Warteg di Singosari Timur, Wonodri Semarang. "Dia tetangga sebelah. Datang ke warung, pukul 22.00. Tidak beli apa-apa, menukar uang 200 ribu ternyata palsu," ungkap Ny Asti, pemilik Warteg di Mapolrestabes Semarang, Rabu (23/11)

Dari pengembangan hasil penyidikan, polisi lalu membekuk At (24) orang yang mencetak upal. Dim mendapatkan upal dari At warga Bugangan Semarang dengan cara membeli uang Rp 100 ribu asli mendapat 300 ribu upal atau 1 banding 3.

Selain meringkus dua orang pencetak dan pengedar upal, petugas juga menyita barang bukti di antaranya lembaran uang 100 ribu palsu senilai Rp 4 juta, uang palsu pecahan 20 ribu senilai 260 ribu. Selain itu ditemukan uang palsu senilai Rp 400 ribu siap potong, 21 lembar kertas yang telah dicetak nominal Rp 100 ribu (palsu), dan 15 lembar kertas yang

telah dicetak nominal 20 ribu.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lumbartoran, menjelaskan terungkapnya peredaran upal itu bermula dari informasi masyarakat adanya penukaran uang palsu di sebuah Warteg berlokasi di Jalan Singosari Timur. Setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan di lokasi. "Selanjutnya dilakukan pengembangan, ternyata yang melakukan pencetakan uang palsu adalah At," jelasnya.

Tersangka At jebolan SMP mengakui terus perbuatannya. Katanya, membuat uang palsu dari ide sendiri. "Awalnya dari ide sendiri. Sudah mencetak sekitar 10 bulan.

Nyetak tidak setiap hari, sudah mencetak sekitaran 70 juta uang palsu, pecahan 100 ribu dan 20 ribu. Kalau yang 100 ribu palsu ya sekitaran 50 jutaan (palsu)," jelasnya. Tersangka At mengaku mencetak uang palsu tersebut tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya kalau ada pesanan. (Ayu)-f

LAKALANTAS MAUT KEMBALI TERJADI DI SLEMAN Tabrak Jembatan, Dua Nyawa Melayang

SLEMAN (KR) - Kecelakaan maut lagi-lagi terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman. Kali ini dua nyawa tak tertolong setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Wates Km 8,5 tepatnya depan SPBU Perengdawe,

Ngaran, Balecatuur Gamping, Kamis (24/11) pagi.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sleman, Iptu dua Nyawa Laksono, mengatakan kedua korban adalah NF (20) dan HKW (19). "Kedua korban merupakan warga Cilacap Ja-

wa Tengah. Dugaannya mengantuk karena kedua korban perjalanan dari Cilacap, sehingga tidak konsentrasi saat berkendara," jelasnya.

Dikatakan, kedua korban berboncengan sepeda motor Honda Vario Nopol R 2682 NN. Korban NF merupakan pengendara sepeda motor, sedangkan HKW adalah pemboncengnya. Keduanya melaju dari arah barat ke timur dan menjelang di TKP sekitar pukul 05.30 WIB, sepeda motor mereka oleng ke kiri dan membentur jembatan.

Akibat kerasnya benturan, kedua korban terjatuh dan langsung meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami cidera kepala berat. (Ayu)-f



KR-Dok Satlantas Polresta Sleman

Petugas Satlantas Polresta Sleman melakukan olah TKP.

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK MA YIS Terbukti Memalsukan Nilai Ijazah

YOGYA (KR) - Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA (Kasasi) yang menjatuhkan pidana penjara 6 bulan potong tahanan kepada Supriyanto Bendahara SD Yogyakarta Independent School (YIS), ditolak MA. Pelapor, Erika Handriati, orangtua siswa Adl mengapresiasi putusan yang menjawab perjuangannya selama 3 tahun lebih mencari keadilan.

"Putusan PK ini membuat putusan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan menegaskan bahwa YIS secara meyakinkan dan sah telah melakukan tindak pidana memalsukan nilai 2 mata pelajaran yang tidak diajarkan di ijazah kelulusan siswa SD tahun ajaran 2015/2016," tegas Erika kepada KR Kamis (24/11).

Sebelumnya, Erika melaporkan YIS ke polisi karena ia menemukan ada nilai palsu di ijazah untuk 2 mata pelajaran yang tidak pernah dia-

jarkan, yaitu Pendidikan Agama dan PPKN. Polisi kemudian menetapkan Supriyanto sebagai tersangka dugaan menyuruh orang lain memasukkan nilai 2 mapel tersebut di ijazah.

"Dalam pengadilan tingkat pertama di PN Sleman, 22 September 2021 Supriyanto divonis bebas murni atas segala dakwaan. JPU kemudian menyusun memori Kasasi yang kemudian dikabulkan MA. Supriyanto sendiri telah menjalani eksekusi hukuman sejak pertenga-

han Maret 2022 dan diperkirakan sudah bebas Mei 2022," ungkap Erika.

Pihak YIS langsung mengajukan PK tanpa menunggu salinan putusan kasasi dari MA dengan alasan ada novum (bukti baru). Setelah sekian bulan PK yang diajukan YIS ditolak Hakim MA.

"Terbongkarnya kasus penempatan nilai palsu dalam ijazah Adl, sesungguhnya puluhan ijazah SD SMP dan SMA dari tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017 juga mengalami kondisi yang sama yaitu memuat nilai palsu untuk mapel Pendidikan Agama dan PPKN. Sejauh ini baru saya yang mempermasalahkan hingga ke jalur hukum. Hari ini saya masih menggugat YIS di perdatanya sudah masuk ke tahap pembuktian di PN Sleman," ungkapnya. (Vin)-f

PANITERA PN YOGYA SUDAH AJUKAN SKT KE BPN Eksekusi Tak Perlu Lagi Fotocopy Sertipikat

YOGYA (KR) - Soal fotocopy sertifikat yang diminta sebagai syarat eksekusi, (KR, Kamis 24/11), Panitera PN Yogya sudah melakukan terobosan dengan melalui Ketua PN Yogya untuk meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) ke BPN DIY. Sehingga dalam waktu dekat ini proses eksekusi tanah bisa dilanjutkan dengan appraisal.

"Ada miss komunikasi dengan advokat (kuasa hukum) pemohon lelang, Oncan Poerba SH. Selama ini kita hanya bersurat-suratan dan kami juga memaklumi kesibukan beliau (Oncan). Proses eksekusi sempat terhambat karena ada persyaratan yang belum dipenuhi (fotocopy sertifikat) sehingga kami bersurat untuk kelanjutan proses eksekusi," tutur Panitera Abdul Kadir Rumodar SH ketika dikonfirmasi KR, Kamis (24/11).

Selanjutnya dengan terobosan meminta SKT ke BPN DIY pada 10 November 2022 lalu dan dipenuhi BPN, maka sudah tidak perlu fotocopy dan proses eksekusi bisa dilanjutkan. "Rencana 2 Desember 2022 kita akan mengundang appraisal dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan segera dilakukan penghitungan nilai tanah yang akan dieksekusi," jelasnya.

Setelah dilakukan perhitungan (appraisal) akan dilaporkan ke Pengadilan tentang nilai object tersebut dan baru ditetapkan nilainya. "Kita bisa maklumi kekhawatiran kuasa hukum pemohon eksekusi jika dicoret. Namun telah kita bantu solusinya dan proses tetap jalan," tegasnya.

Sementara ketika dikonfirmasi, Oncan Poerba menyatakan pihaknya telah menang hingga tahap kasasi MA bahkan sampai PK, sehingga telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) serta tidak ada alasan untuk tertundanya eksekusi. "Eksekusi harus segera dijalankan demi keadilan dan kepastian hukum," tegasnya.

Oncan juga tidak pernah sibuk dalam menjalankan profesinya. "Itu sudah menjadi kewajiban saya, tapi penyerahan fotokopi sertipikat bukanlah kewajiban saya sebagai kuasa Pemohon Eksekusi. Tidak benar juga fotokopi sertipikat sebagai syarat dalam suatu eksekusi," jelasnya.

Putusan Perkara yang dimaksud adalah perkara perdata No 73/Pdt-G/2016/PN.Yyk jo No 33/Pdt/2017/PT.YYK jo No 3450 K/Pdt/2017 jo No 491 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara itu ber-

awal dari masalah utang piutang sebesar Rp 2,7 miliar.

"Permohonan eksekusi telah diajukan lebih dari 2,5 tahun lamanya tapi belum juga dilakukan. Justru pada 28 Oktober 2022, klien kami mendapat surat dari panitera PN Yogya yang meminta fotocopy sertipikat objek yang akan dieksekusi. Jika fotocopy itu tidak diserahkan dalam waktu 30 hari, register permohonan eksekusi terancam dicoret," ungkapnya.

Oncan menanggap isi surat panitera itu aneh. Padahal mereka tahu objek tanah dan bangunan yang akan dieksekusi lelang, telah disita oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Dengan fakta-fakta itulah, kami mohon kepada Ketua PN Yogya segera melaksanakan eksekusi, karena tidak ada alasan hukum yang membuat fotocopy sertipikat harus dimiliki pemohon eksekusi dan diserahkan kepada PN Yogya, terlebih lagi objek tanah dan bangunan yang akan dilakukan lelang eksekusi telah diletakkan sita jaminan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. "Eksekusi harus segera dijalankan demi keadilan," tegasnya. (Vin)-f